

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KANTOR DPPKB KOTA PEMATANGSIANTAR

Vera A. Pasaribu¹ Tiarma Widia Devi Sitanggang², Alfred N. Tambunan³, Agus
Kristin Saruksuk⁴, Vera Aginta Purba⁵

¹ Dosen Prodi Adm. Publik Fisipol UHN Medan

²³⁴⁵ Mahasiswa Prodi Adm. Publik Fisipol UHN Medan

vera.pasaribu@uhn.ac.id

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di DPPKB Kota Pematangsiantar melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci yaitu Kepala Kepegawaian DPPKB, informan utama yaitu Sekretaris dan Kabid Keluarga Sejahtera DPPKB dan informan tambahan yaitu lima orang masyarakat peserta KB. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari lokasi penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Jhon Creswell dimana ada enam langkah analisis data yaitu, mengelolah data, membaca keseluruhan data, menganalisis data dengan meng-coding data, proses coding, mengdeskripsikan data, dan menginterpretasikan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pelayanan KB di Kota Pematangsiantar sudah cukup baik yang didukung dengan adanya Standar, tujuan, sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Komitmen, Struktur Birokrasi, dan Disposisi Implementor. Untuk mencapai tujuan dari program KB, maka disarankan DPPKB harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya, penambahan jumlah implementor, meningkatkan Komunikasi dan meningkatkan koordinasi antar implementor pelaksana dengan masyarakat peserta KB, serta masyarakat setempat agar lebih meningkatkan partisipasi yang maksimum terhadap program KB di Kota Pematangsiantar.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Penduduk, Implementasi, dan Program KB*

ABSTRACT: The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Family Planning Service Program (KB) at DPPKB Pematangsiantar City through a qualitative descriptive approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews conducted with key informants, namely the Head of DPPKB Staffing, the main informant, namely the Secretary and Head of the DPPKB Prosperous Family and additional informants, namely five community members participating in family planning. Secondary data obtained through documentation from the research location. The data analysis technique used in this research is based on John Creswell's theory where there are six steps of data analysis namely, managing data, reading all data, analyzing data by coding data, coding process, describing data, and interpreting data.

The results of the study show that the implementation of the Family Planning Service Program in Pematangsiantar City is good enough, which is supported by the existence of Standards, goals, policy objectives, Resources, Communication, Commitment, Bureaucratic Structure, and Implementor Dispositions. To achieve the objectives of the family planning program, it is suggested that the DPPKB should further improve the quality of its services, increase the number of implementers, improve communication and improve coordination between implementers and the community planning participants, as well as the local community in order to further increase maximum participation in the family planning program in Pematangsiantar City.

Keywords: *Population Growth, Implementation, and Family Planning Programs*

PENDAHULUAN : Penelitian ini mengangkat tema mengenai faktor-faktor dalam penerapan program keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan

keluarga di Kota Pematangsiantar. Angka kelahiran yang tinggi menjadi salah satu pemicu rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga. Program pemerintah dalam suatu daerah merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dalam menyelesaikan suatu problematika. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai bagaimana Implementasi Program Pelayanan Keluarga Berencana di Pematangsiantar.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dan menempati kedudukan keempat yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia. “Berdasarkan survei data *Worldometers*, Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada tahun 2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa dan pada tahun 2019 silam mencapai 269 juta jiwa”¹. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ketahun merupakan bukti nyata dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk pada negara Indonesia. Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan memberi dampak negatif pada rakyat menengah kebawah terutama pada rakyat termiskin. Faktor utama dari tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sendiri dikarenakan melonjaknya angka kelahiran pada negara ini. Angka kelahiran pada setiap segi tertentu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dilihat dari segi wilayah, seperti pada pedesaan dan kota, jauh lebih tinggi angka kelahiran pada wilayah pedesaan dibandingkan di wilayah kota penyebabnya karena masih banyak penduduk desa yang memegang prinsip banyak anak banyak rejeki, dari segi tingkat pendidikan, serta tuntutan dari segi budaya sendiri seperti halnya dengan suku batak yang harus memiliki penerus marga ayahnya dalam keluarga tersebut. Jika dibiarkan pada situasi yang seperti ini maka pemerintah akan semakin kewalahan untuk mengupayakan kesejahteraan penduduknya sendiri terlebih dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang nantinya dapat mengakibatkan terhambatnya sistem pelayanan dasar lainnya.

Kemiskinan adalah masalah pembangunan yang serius diberbagai bidang yang dialami oleh beberapa negara di dunia ditandai dengan pengangguran dan keterpurukan masyarakatnya, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang jitu dalam menanggulangnya serta setiap negara harus bekerjasama untuk mengatasinya. Sehingga diperlukan akses pelayanan kepada publik untuk menanggulangi tingginya angka jumlah kelahiran penduduk. Agar dapat mencegah berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Pelayanan merupakan salah satu aktivitas suatu kelompok ataupun individu serta dalam sebuah organisasi dalam memenuhi suatu kebutuhan. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Bidang kesehatan menempati urutan kedua dari bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut seperti membuat Undang-Undang (UU) perkawinan yang mengatasi usia minimal seseorang yang boleh menikah, membatasi memberikan tunjangan anak bagi PNS dan ABRI maksimal sampai dua anak, melalui pendekatan pendidikan, mempermudah dan meningkatkan pendidikan supaya keinginan untuk segera menikah dapat dihambat dan meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar dari 6 tahun menjadi 9 tahun, serta merencanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan cara melakukan pendekatan pendidikan dan mengenalkan berbagai alat kontrasepsi, membangun fasilitas kesehatan yang mudah dan murah.

Keluarga berencana merupakan program yang sangat besar di Indonesia, namun kualitas pelayanan keluarga berencana masih belum optimal, khususnya dalam kinerja dari para petugas pelayanan itu sendiri. Di kota Pematangsiatar sendiri BKKBN yang telah berganti nama menjadi DPPKB singkatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejak tahun 2010 karena disesuaikan oleh struktur organisasi yang ada, namun program yang dijalankan tetap sama dengan yang sudah ada sebelumnya.

Beberapa program pelayanan KB yang menjadi prioritas BKKBN beberapa tahun ini antara lain adalah program KB bagi Generasi Muda memasuki usia nikah, Program pelayanan KB bagi penduduk miskin, Program bina keluarga balita (BKB), Program Bina Keluarga Remaja (BKR), Program Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan terdapat dalam Undang-Undang (UU) No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta peraturan pemerintah No. 27 tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan. Tujuan program keluarga berencana (KB) selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga bertujuan untuk memperbaiki kesehatan serta kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas, serta menurunkan angka kematian untuk ibu dan anak.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelolah suatu permasalahan yang tujuannya untuk mensejahterakan kembali masyarakatnya sendiri. Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, seperti dari UUD, Peraturan menteri, Keputusan Presiden, peraturan desa, hingga keperaturan Rukun Tetangga (RT). Kebijakan publik merupakan tindakan nyata yang telah disepakati bersama, dengan adanya kebijakan publik ini pemerintah dapat memberikan arah yang jelas dalam

menyikapi suatu permasalahan.

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Terbentuknya suatu kebijakan publik tentu lah membutuhkan suatu proses, melibatkan bermacam-macam rancangan strategi yang terlebih dahulu harus dipelajari. Maka dari itu beberapa pakar politik yang menaruh minat untuk mempelajari kebijakan publik serta membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya agar mudah mengkaji kebijakan publik tersebut.

Seperti tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn sebagai berikut,

1. Penyusunan Agenda, para Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali
2. Tahap Formulasi Kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Tahap Adopsi Kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative consensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Tahap Penilaian Kebijakan, unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan

Model Kebijakan Publik

Model dapat digunakan karena adanya suatu permasalahan yang rumit, dengan cara mengkaji kembali studi yang pernah dilakukan oleh seseorang. Dilakukannya model ini agar dapat menggambarkan dengan jelas macam-macam masalah yang terdapat dalam setiap penelitian yang dilakukan. Sesungguhnya terdapat beberapa model kebijakan, yang dapat digunakan dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Beberapa model yang dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. “Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi kebijakan.
2. Model Normatif, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas satu nilai. Beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan adalah (1) model antri, yaitu model model normatif yang bantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum; (2) model penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan dan perbaikan yang optimum; (3) model inventaris, yaitu pengaturan waktu dan volume yang optimum; (4) model

- biaya-manfaat, yaitu, perlunya keuntungan optimum pada investasi publik.
3. Model Verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu verbal, symbol, dan procedural. Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari. Dalam menggunakan model ini, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argument kebijakan, tetapi bukan dalam bentuk nilai-nilai angka yang pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan ke publik dan biaya murah dan dapat mengandalkan debat publik. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah yang digunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argument tersebut secara keseluruhan.
 4. Model Simbolis, model ini menggunakan symbol statistic, matematik, dan logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis. Biaya model simbolis mungkin tidak lebih besar dari model verbal. Namun, kelemahan praktis model simbolis adalah mungkin hasilnya tidak mudah diinterpretasikan, bahkan diantara spesialis, karena asumsinya mungkin tidak dinyatakan secara memadai.
 5. Model Prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variable yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan. Biaya model ini relatif lebih tinggi jika dibanding dengan model verbal dan simbolis,

Implementasi Kebijakan

“Implementasi adalah proses/dampak dari sebuah gagasan yang telah disusun dengan sedemikian rupa. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang disepakati dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan public”⁵. Implementasi kebijakan harus mampu menghubungkan antar tujuan yang telah dirumuskan dengan hasil yang akan dilakukan untuk kedepannya. Kesepakatan para administrator yang menjadi peran dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks karena dalam pelaksanaannya tidak lepas dari sistem yang ada, sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak dari sistem itu sendiri. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses kebijakan setelah undang-undang yang ditetapkan lembaga yang berwenang yang dilakukan oleh pemerintah dan diterapkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan suatu Implementasi dapat digambarkan dari beberapa implementor, tipe kebijakan maupun jenis kelompok dan sebagainya. Dengan demikian, upaya untuk menjelaskan peristiwa implementasi sering dikaitkan antar hubungan kinerja implementasi, kualitas sumber daya manusia birokrasi sebagai implementor, dukungan kelompok sasaran, dan lainnya.

Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat menghubungkan antara tujuan dari kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah itu sendiri. Untuk memperlancar implementasi kebijakan perlu dilakukan suatu tahapan dalam memperoleh proses implementasi yang memuaskan ataupun idea, serta agar program tersebut tidak hanya sekedar menjadi *planning* dalam suatu kebijakan. Pada tahap implementasi ini berbagai kegiatan akan saling bersaing. Berikut Tahapan implementasi kebijakan publik, antara lain : Budi Winamo. Kebijakan Publik, Yogyakarta: CAPS, 2018, hal. 147 “Tahapan Interpretasi (*Interpretation*). Tahapan Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang lebih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas ini juga diikuti kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh elemen masyarakat (*stakeholder*) dan kelompok sasaran dapat mengetahui dan memahami arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Tahapan Pengorganisasian (*Organized*). Tahapan pengorganisasian lebih mengarah kepada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) yang meliputi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, koordinasi implementasi kebijakan, menetapkan anggaran, menetapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tahapan Aplikasi (*Application*) Tahap Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Tahap aplikasi merupakan tahap paling akhir karena pada tahap ini dapat dilihat apakah kebijakan tersebut hanya sebuah rumusan kebijakan atau penafsiran mengenai kebijakan yang abstrak atau bisa diimplementasikan dan dapat menjawab tantangan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan salah satu konsep penting upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Menurut Undang-undang RI No 25 tahun 2009 tentang “pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Menurut Thoha sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si. dalam bukunya mengatakan “Pelayanan publik dapat dipandang sebagai usahayang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Menurut Sinambela sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si. dalam bukunya mengatakan “Pelayana publik juga dapat dipandang sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Institusi ini didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Pada dasarnya dalam pelayanan publik pemerintah harus lah memiliki pegangan prinsip dalam melayani masyarakatnya agar mendorong penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan publik, seperti Dalam keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, disebutkan bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik dimana adanya transaksi antara pemberi layanan dan penerima pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) “Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b) Kejelasan, a) persyaratan teknis dan administrative pelayanan public; b) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c) Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d) Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e) Keamanan, proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Sebagaimana disebut pada bab satu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Berencana (KB) dengan fokus penelitian mengenai program Keluarga Berencana (KB) di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi program keluarga berencana (KB) di kota Pematangsiantar dan apa saja Faktor- faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Program Keluarga Berencana (KB) tersebut.

Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dibuat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara sekaligus mewujudkan suatu keinginan demi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan publik akan berujung pada tindakan pemerintah yang didukung oleh dua hal yaitu sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan dan nilai-nilai yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, baik secara individu maupun pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam isi kebijakan itu. Tujuan kebijakan (KB) tersebut tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam pencapaian tersebut maka digunakanlah sebuah tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebij akan. Dengan kata lain dalam

mengimplementasikan kebijakan publik harus ada tahap-tahapan sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Tahap implementasi merupakan tahap yang penting. Dapat dikatakan penting, itu dikarenakan tahap ini merupakan 'jembatan' antara dunia konsep dengan realita. Dunia konsep yang dimaksud disini tercermin dalam kondisi ideal, suatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasi dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan baik sosial, ekonomi maupun politik. Tahap implementasi kebijakan publik yang dilakukan dalam program pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kota Pematangsiantar. Kemudian bentuk nyata dalam Implementasi program pelayanan Keluarga Berencana di Kota Pematangsiantar yang dapat dilihat dari penerapan di beberapa tahapan implementasi kebijakan, antara lain Tahapan Interpretasi, Tahapan Pengorganisasian dan Tahapan Aplikasi. Adapun penjelasan yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Pertama Tahap Interpretasi

Tahap Interpretasi merupakan tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Aktivitas ini juga diikuti kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dan kelompok sasaran dapat mengetahui dan memahami arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Para implementor terlebih dahulu harus memahami isi dari dibentuknya kebijakan tersebut. Ada tidaknya kesulitan yang dihadapi para implementor dapat dilihat melalui tahapan yang pertama ini. Hasil interpretasi biasanya nanti akan berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Seperti dalam pelaksanaannya KB memiliki beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dari program KB.

2. Kedua Tahap Perorganisasian

Tahap Perorganisasian adalah tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata keija, penetapan manajemen kebijakan. Menjadi mekanisme utama yang digunakan oleh para implementor untuk menggerakkan rencana yang telah disusun. Pengorganisasian yang baik akan bisa menciptakan serta memelihara hubungan antara seluruh sumber daya dengan menunjukkan sumberdaya mana yang harus dipergunakan untuk aktivitas tertentu, kapan, dimana dan bagaimana cara menggunakannya.

Dalam tahap ini DPPKB sudah megorganisasikan dengan baik Kebij akan program tersebut. Dapat dilihat dalam bentuk pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pertama dengan cara menginformasikan kebijakan dan kinerja para implementor, para pelaksana KB dapat cukup baik dalam menyampaikan suatu aspirasi dapat dilihat dari jumlah peserta KB tiap Tahunnya meningkat meskipun tidak begitu melonjak. Mereka menginformasikannya program tersebut salah satu caranya melalui penyuluhan-penyuluhan yang mereka gunakan. Dalam penyuluhan tersebut mereka telah menjelaskan tujuan utama dari program KB tersebut, serta

menyampaikan dampak-dampak apa yang terjadi jika ikut serta dalam program ini. Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi kemudian dikonseptualkan sebagai kinerja implementasi.

Kinerja implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi. Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas, atau pelaksanaan yang dilakukan seseorang, kelompok ataupun organisasi. Kinerja dengan demikian dapat menunjukkan hasil atau pencapaian. Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan baik itu berupa keluaran kebijakan maupun hasil kebijakan. Seperti yang disampaikan salah satu masyarakat atas pencapaian kualitas kinerja implementasi pelayanan yang diberikan DPPKB terhadap masyarakat peserta KB “dengan adanya penyuluhan program KB ini membuat saya sadar dengan mengikuti kb dapat memberikan manfaat pada umumnya, khususnya pada saya sendiri, serta mereka melakukan pekerjaannya dengan senang hati dan maksimal sehingga manfaat dari program kb ini tersampaikan kepada masyarakat di kelurahan ini. Namun jikaalau tahapan ini telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya, tetap menghadapi suatu kendala, seperti dalam sarana prasarana masih tetap saja terdapat kecamatan yang tidak menyediakan alat kontrasepsi yang lengkap sehingga jikaalau masyarakat yang menggunakan harus menunggu hingga alat itu masuk ke kecamatan mereka.

3. Ketiga Tahap aplikasi

kelompok target atau sasaran kebijakan. Dalam proses pengaplikasian dan pengoperasiannya harus berdasarkan prosedur yang ada sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah diterapkan sebelumnya. Tahap aplikasi di Pematangsiantar sasaran dari kebijakan Program Pelayanan KB adalah masyarakat yang telah berkeluarga. Program KB ini implementasikan guna menekan angka kelahiran. Untuk mempercepat terwujudnya pengendalian angka jumlah penduduk, maka DPPKB menjadikan Program KB sebagai prioritas program yang terealisasikan. Selain untuk pengendalian jumlah penduduk program KB juga bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan serta Perekonomian dan kondisi sosial masyarakatnya.

Meningkatkan Kondisi Sosial dan Ekonomi Peserta KB

Sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas gaya hidup, pendidikan serta pendapatan. Kondisi sosial dan ekonomi merupakan pendukung pelaksanaan program KB, mengingat bahwa program KB adalah sebuah kebijakan yang ditujukan kepada publik sehingga banyak kondisi sosial dan ekonomi saat pelaksanaannya.

- a. Kondisi sosial pada saat pelaksanaan program KB di kota Pematangsiantar adalah banyaknya warga tersebut yang kurang antusias dengan adanya program ini. Warga kurang memahami atau kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya KB. Beberapa faktor menjadi

penyebab rendahnya antusiasme warga, seperti rendahnya tingkat pendidikan mereka, terlalu fanatik terhadap agama yang dianut, dan budaya lingkungan. Pihak KB mengatasinya dengan cara pengaplikasian penyuluhan secara teratur dan terarah pada setiap bulannya, dan memberikan pengarahannya dengan mendatangkan narasumber yang sesuai dengan topik yang akan di sosialisasikan.

- b. Kondisi ekonomi yang dominan mengikuti pelaksanaan program KB adalah kondisi perekonomian menengah kebawah. Keadaan ini yang menjadikan program KB kurang mendapatkan respon yang bagus. Yang diakibatkan karena Tidak hanya Warga terlalu memikirkan biaya yang harus ditanggung saat pemasangan KB, namun Warga yang lebih memprioritaskan kegiatan atau aktivitas hidup sehari-hari daripada digunakan untuk ber-KB. Seperti yang diungkapkan oleh bapak sekretaris DPPKB “bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum antusias dan tanggap untuk program KB, yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan masyarakat itu sendiri, dimana mereka bermasalah terhadap ketidaktersediaan waktu, dan pada umumnya di Pematangsiantar ini sendiri justru masyarakat ekonominya yang lemah lebih banyak berpartisipasi dalam mengikuti program KB, dari pada ekonomi menengah keatas. Dalam program Keluarga Berencana (KB) juga tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran, akan tetapi sekaligus untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan agar meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, sehingga di DPPKB Kota Pematangsiantar membuat solusinya dengan melaksanakan pelatihan rutin agar meningkatkan keterampilan dan memberikan sebuah dana untuk memodali bagi peserta KB yang memang membutuhkan sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga tersebut. Dan dalam mengatasi masalah waktu jam kerja yang bertabrakan dengan pelaksanaan program KB, pihak DPPKB memutuskan dengan melayani pemasangan KB tiap waktunya.

Meningkatkan Pendidikan Anak dan Kesehatan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam diri setiap manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap dan menunjang dalam upaya pembangunan di segala sektor. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan dalam jangka waktu panjang. Namun yang menjadi problemnya sampai saat ini masih banyak orang menengah kebawah yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini dapat disebabkan karena masih tergolong mahal biaya pendidikan dan bagi orang yang kurang mampu yang memang benar-benar tidak ada biaya untuk pendidikan akan lebih mengutamakan biaya untuk kebutuhan sehari-harinya. Permasalahan yang kian terlihat jelas adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Masalah pendidikan untuk rakyat miskin muncul dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti meningkatnya biaya pendidikan dari tahun ketahun, bantuan yang masih sering tidak tepat sasaran, pembiayaan ditanggung sendiri

dalam sistem tunai.

Dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan adanya perubahan pola-pola kebiasaan masyarakat yang selama ini tidak kondusif kearah yang lebih berwawasan yang mampu mengembangkan skill dan kemampuannya dengan membimbing dan mengarahkannya, serta mengubah tuntutan structural undang-undang yang berlaku dalam formulasi dan implementasi lebih nyata dan terarah sesuai tujuan. Dalam memperolehnya dapat dengan menciptakan pelayanan akses pendidikan yang merata bagi segenap rakyat dan persamaan dalam hal memperolehnya dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Program KB berusaha untuk menangani anak-anak tersebut masuk dalam sistem yaitu; melalui penerapan persyaratan komponen pendidikan.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Salah satu orientasi dari program keluarga berencana adalah meningkatkan status kesehatan rumah tangga khususnya bagi ibu dan anak. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh keluarga peserta KB dapat memiliki kesehatan yang baik. Seperti yang diungkapkan kepala kabid keluarga sejahtera “ada program kami namanya Tribina, yang pertama program Kartu Kembang Anak (KKA) disana kita dapat mengontrol bagaimana tumbuh kembang dan Kesehatan anak dari umur 0 bulan - 36 tahun, contohnya kalau anak umur 13 bulan belum dapat bejalan maka nanti akan kita rujuk ke dokter anak, hampir sama dengan program yang ada di posyandu. Program KKA ini tetap bekerjasama dengan pihak kedokteran karena pihak yang mengetahui kebutuhan gizi anak tersebut pihak mereka, kami hanya membantu bagaimana mengontrol tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya.

Tribina selanjutnya, untuk kelompok-kelompok remaja, bagaimana agar remaja tersebut tidak terj erumus kepada obat-obatan terlarang, karena nantinya yang akan meneruskan generasi bangsa ini kan nantinya harus orang-orang yang sehat lah. Maka dari itu kami melakukan pembinaan- pembinaan terhadap remaja-remaja siantar dan hampir tiap bulan kami memberangkatkan remaja tersebut ke Medan untuk pelaksanaan pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Dan saat ini salah satu penyebab peningkatan penduduk itu juga kan adanya pernikahan dini yang dimana itu dapat berefek kepada kesehtan si wanita apabila sudah mengandung di umur yang sangat mudah, bahkan dapat menyebabkan kematian kepada calon ibu mudah tersebut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terhadap remaja-remaja itu juga seperti memberi pemahaman efek dari pernikahan dini tersebut yaitu, rentan keguguran, kemudian pembuahan seksualitas yang belum matang, tentang pengetahuan-pengetahuan keluarga. Kemudian yang tribina yang ketiga Bina Keluarga Lansia (BKL) , orangtua kita juga masih perlu sehat dan harus dihormati hingga hari tuanya nanti sehingga kami juga membentuk kelompok-kelompok untuk memberi pembinaan dan kegiatan, seperti mengadakan senam bagi lansia dan pembinaa terhadap wali dari lansia maupun lansia itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis Implementasi Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Pematangsiantar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Adapun Kategori yang mempengaruhi suatu implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Pematangsiantar meliputi : Standar, tujuan dan sasaran kebijakan, dalam pencapaian tujuan dan target sasaran dalam program Keluarga Berencana (KB) di Kota Pematangsiantar dapat dikategorikan tepat sasaran terlihat dari peningkatan angka peserta KB mengalami kenaikan, sehingga jumlah angka kelahiran penduduk di Kota Pematangsiantar beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, namun belum signifikan atau belum sesuai yang diharapkan. Sumber daya, dalam kualitas sumber daya di DPPKB Kota Pematangsiantar memanfaatkan meliputi tiga sumber daya, pertama dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) mereka cukup memiliki kualitas yang baik dimana mereka memiliki implementor yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Kedua dari sumber daya finansial, dana yang diperoleh dari APBD digunakan sebagaimana mestinya dilihat dari adanya bantuan modal yang diperoleh keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga juga. Ketiga sumber daya waktu, pihak DPPKB membuat program KB memang dengan baik dimana mereka juga secara rutin membuat pertemuan tiap bulannya bagi peserta KB yang ibu-ibu, untuk kelompok remaja pertiga bulan mengadakan pelatihan dan sosialisasi, serta bagi Bina Keluarga Lansia masih rutin mengadakan pertemuan dan mengadakan kegiatan senam pagi guna meningkatkan kesehatan bagi para lansia. DPPKB memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan cukup baik Komunikasi, yang diperoleh masyarakat peserta KB di Kota Pematangsiantar sudah cukup baik. Secara umum untuk komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program kebijakan ini juga sudah cukup baik. Dimana antar pihak saling memberikan informasi, masukan, arahan, pembinaan yang menyangkut tentang program KB di kota Pematangsiantar.

Komitmen, dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) para peserta KB sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajibannya. Tampak dari keseriusan mereka dalam mengikuti setiap kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pelaksana KB, dan belum ada yang pernah terkena sanksi serius kategori melakukan penyimpangan-penyimpangan. Namun yang menjadi kendala bagaimana mempertahankan komitmen mereka dalam berpartisipasi di KB ini. Struktur Birokrasi, masih terkendali dengan baik dimana sistem mekanisme kerja mereka mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sehingga segala sesuatunya telah tersusun dan terencana dengan cukup baik. Dan itu harus dipertahankan mengingat KB di Pematangsiantar memperoleh penghargaan se-Sumatera Utara.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap analisis implementasi program pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kota Pematangsiantar, maka rekomendasi yang dapat disampaikan penulis yaitu:

1. DPPKB Pusat dan jajarannya supaya mengoptimalkan implementasi

- Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) agar lebih sesuai dengan standar yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan program Keluarga Berencana (KB).
2. Pelaksanaan program KB harus berdasarkan pedoman pelaksanaan, agar implementor pelaksana tidak menjalankan program berdasarkan intepretasinya masing-masing.
 3. Perlu adanya penambahan jumlah implementor program Keluarga Berencana (KB) mengingat dari target sasaran yang belum begitu terpenuhi, serta agar nantinya daerah terpencil sekalipun dapat terjangkau. Komunikasi dan koordinasi antar implementor pelaksana dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon. 2017. *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayat. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustafa, Talib Abdul. 2017. *Kemitraan dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Calpulis.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sinambela, Poltak Lijan. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkap Dengan Metode R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulisyawati, Ari. 2011. *Pelayanan keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.
- Winarno, Budi. 2018. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: CAPS.